

MENCUATNYA KENAIKAN GAJI HAKIM SEBESAR 280%: APA YANG HARUS DILAKUKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA?

Oleh: Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

(Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)

Pendahuluan

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim secara signifikan, bahkan mencapai angka 280% bagi golongan hakim paling bawah. Ini merupakan angin segar di tengah perjuangan panjang para hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisial di tengah keterbatasan fasilitas dan penghasilan yang selama ini belum sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang dipikul.

Di satu sisi, kebijakan ini disambut hangat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya posisi hakim sebagai penjaga keadilan. Di sisi lain, muncul pertanyaan reflektif: bagaimana seharusnya para hakim merespons kenaikan ini, khususnya hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak mengejar gemerlap duniawi, namun tetap membutuhkan kesejahteraan yang layak untuk menopang kehidupan dan menjaga marwah jabatan?

Makna Kenaikan Gaji di Tengah Amanah Keadilan

Dalam pidato pengukuhan para hakim baru yang disampaikan pada Juni 2025, Presiden Prabowo menekankan bahwa hakim merupakan “benteng terakhir keadilan” dan oleh karenanya tidak boleh hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia menyoroti realitas bahwa selama hampir dua dekade, gaji hakim nyaris tidak pernah mengalami kenaikan yang berarti. Bahkan, ada hakim-hakim yang masih berstatus kontrak dan tinggal di rumah dinas yang tidak layak huni. Kenaikan gaji ini bukanlah bentuk kemewahan, melainkan instrumen agar para hakim tidak terjerumus dalam praktik suap dan tetap menjaga independensi dalam memutus perkara.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, dalam sambutannya saat menanggapi kebijakan ini, memberikan pesan yang tegas namun sarat makna:

“Kesejahteraan yang ditingkatkan harus sebanding dengan integritas yang diperkuat.” Ia mengingatkan seluruh jajaran hakim agar menghilangkan praktik pelayanan transaksional dan tidak menjadikan pengadilan sebagai ruang negosiasi kepentingan, apalagi demi keuntungan pribadi.

Posisi Hakim Pengadilan Agama dalam Dinamika ini

Hakim Pengadilan Agama, dengan latar belakang dan nuansa tugas yang sangat spesifik, kerap dihadapkan pada perkara-perkara yang menyangkut akidah, akhlak, dan harmoni keluarga umat Islam. Dalam banyak kasus, hakim agama tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penasehat, mediator, bahkan penjaga nilai-nilai sosial keagamaan.

Selama ini, banyak hakim agama yang menjalankan tugasnya dengan kesungguhan dan pengorbanan yang luar biasa, jauh dari sorotan media dan gemerlap pemberitaan. Mereka tidak mengejar popularitas, apalagi kekayaan. Namun hal itu tidak berarti bahwa kesejahteraan bukan hal yang penting. Justru sebaliknya, kesejahteraan adalah kebutuhan pokok agar seorang hakim dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, tanpa gangguan kebutuhan hidup yang tak terpenuhi.

Apa yang Harus Dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama?

Pertama, penting bagi para hakim agama untuk mensyukuri kenaikan ini dengan tetap menjaga amanah yang diemban. Mensyukuri bukan hanya dalam bentuk ungkapan lisan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan, profesionalitas dalam bekerja, serta menjaga sikap rendah hati dalam bertugas.

Kedua, menjaga integritas adalah harga mati. Kenaikan gaji seharusnya menjauhkan hakim dari segala bentuk pelanggaran etika dan hukum. Justru dengan meningkatnya kesejahteraan, harus ada semangat baru untuk memperkuat budaya integritas, menolak segala bentuk gratifikasi, serta menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu.

Ketiga, para hakim perlu memperkuat literasi dan kapasitas diri. Dengan gaji yang meningkat, kesempatan untuk mengakses sumber daya pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan diri semakin terbuka. Hal ini penting agar para hakim,

khususnya di lingkungan Peradilan Agama, mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi kompleksitas perkara dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Keempat, para hakim juga harus terlibat aktif dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Kesejahteraan bukan hanya soal materi, tetapi juga suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Kelima, hakim-hakim senior perlu menjadi teladan dan pembimbing bagi hakim-hakim muda. Kenaikan gaji ini hendaknya tidak membuat munculnya sekat antar generasi atau semangat kompetisi yang tidak sehat, melainkan memperkuat semangat kolegalitas dalam tubuh peradilan.

Penutup

Kenaikan gaji hakim sebesar 280% adalah hadiah dan tantangan sekaligus. Hadiah dari negara yang mengakui pentingnya tugas hakim, namun juga tantangan untuk membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak disia-siakan. Di tengah sorotan publik, hakim pengadilan agama harus mampu menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan menjadi pintu masuk kesombongan, melainkan jembatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan.

Sudah waktunya para hakim, terutama di lingkungan Peradilan Agama, menampilkan wajah peradilan yang agung: adil, bersih, dan berwibawa. Karena sejatinya, keadilan yang dijalankan dengan hati yang ikhlas dan sejahtera, akan melahirkan kedamaian yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjadi refleksi sekaligus pemantik semangat bagi seluruh hakim Pengadilan Agama, agar tetap teguh menjaga marwah dan mengembangkan profesionalisme dalam suasana baru yang lebih sejahtera.